

## DETERMINAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

Sri Hartaty<sup>1)</sup>, Maria Maria<sup>2)</sup>, Maria Sari<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Politeknik Negeri Sriwijaya  
email: atik.hasyim@gmail.com

### **Abstract**

*The aim of this research is to knowing and analyze the effect of region financial accounting system, control activities, and quality of government human resource to financial accountability with quantitative method. Population used in this research is all staff in financial division and reporting division at BPKAD Sumatera Selatan Province. The sampling technique in this research is jenuh sampling. The data were collected through survey using the questionnaire. The result of the analysis showed that (1) the effect of region financial accounting system, control activities, and quality of government human resource give positive and significant influence simultaneously on region financial accountability.(2) Region financial accounting system give negative and significant influence on region financial accountability. (3) Control activities give positive and significant influence on region financial accountability. (4) the result shown the quality of Government Human Resource give positive and significant influence on region financial accountability.*

**Keywords:** SAKD, Pengendalian, Keuangan, Daerah, Aparatur

### 1. PENDAHULUAN

#### a. Latar Belakang

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

Salah satu bentuk komunikasi pemerintah daerah terhadap masyarakat adalah laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah. Laporan keuangan ini merupakan output dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD merupakan pendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien dan efektif. Sebagaimana diungkapkan Halim (2008), perlunya penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri No 59/2007 yang antara lain menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, yaitu dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan SAKD harus berdasarkan pada Permendagri No 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yaitu berbasis akrual. Halim dan Kusufi (2012) menyatakan bahwa

penerapan basis akrual memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang akuntabel. Selanjutnya Soleh dan Rochmansjah (2010) mengungkapkan bahwa prinsip dalam SAKD sangat diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah, meliputi : (1) akuntabilitas; (2) *Value for money*; (3) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik; (4) transparansi; dan (5) Pengendalian. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas kinerja keuangannya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang tercermin melalui opini auditor.

Selain penerapan SAKD, keberadaan sumber daya manusia (dalam hal ini aparatur pemerintah daerah) juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan. Warisono (2008) mengungkapkan bahwa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Kemampuan dan keahlian untuk mencapai hasil yang optimal merupakan suatu cara dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga dapat ditarik satu benang merah bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan adanya aparatur pemerintah yang kompeten/profesional, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan juga berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari auditor. Menurut Undang-Undang No

1/2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap laporan keuangan. Opini BPK merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Dalam hal ini diperlukan kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Ketika auditor memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan opini audit Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 hingga 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan dalam kualitas laporan keuangan sehingga mendapatkan opini WTP. Berdasarkan peningkatan opini hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah penelitian.

Implementasi SAKD dalam penelitian Soleha (2014) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan dalam penelitian Saputra (2014) SAKD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Aktivitas Pengendalian memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, seperti yang diungkapkan oleh Soleha (2014). Sedangkan yang diungkapkan Santoso (2016) sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Selanjutnya Kurnia (2013) dan Santoso (2016) mengungkapkan bahwa kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Soleha (2014) yang membuktikan bahwa SAKD dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penulis mengambil objek penelitian di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan menambahkan variabel kualitas aparatur pemerintah, untuk menguji pengaruh kualitas aparatur terhadap akuntabilitas keuangan dengan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang dimiliki aparatur pemerintah.

#### **b. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

3. Apakah kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ?

#### **c. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti agar terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan penerapan SAKD, aktivitas pengendalian, kualitas aparatur pemerintah daerah dan akuntabilitas keuangan daerah.
2. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan unit pengamatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai entitas pelaporan pemerintah.

#### **d. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk menguji pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk menguji pengaruh kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## **2. KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **a. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Dalam konteks akuntansi keuangan daerah terdapat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Menurut Permendagri Nomor 64/2013 bahwa :

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Sedangkan Erlina (2015) menyatakan bahwa : SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri No. 64/2013 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi: Prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, akuntansi asset dan

penyajian laporan keuangan. Secara spesifik, hasil dari SAKD tersebut ialah adanya suatu laporan keuangan daerah. Tujuan laporan keuangan daerah adalah menyediakan informasi yang berguna. Selain itu juga laporan keuangan digunakan untuk menunjukkan keakuntabilisan suatu entitas yang ditujukan kepada sumber daya yang dipercayakan.

#### **b. Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP No. 71/2010). Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Menurut PP No.71/2010 komponen laporan keuangan ada 7 yaitu : Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali: (1) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; dan (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

#### **c. Aktivitas Pengendalian**

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **d. Kualitas Aparatur Pemerintah**

Menurut Hutapea dan Thoha (2008) “kompetensi kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan”. Masih menurut Hutapea dan Thoha (2008) bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu. Sedangkan Warisono (2008) mengungkapkan bahwa SKPD harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Kegagalan aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

#### **e. Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Dalam *good governance*, akuntabilitas merupakan elemen penting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Menurut Mahmudi (2010) Akuntabilitas merupakan agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Sedangkan menurut Lukito (2014): Akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis akuntabilitas ini memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan. Sistem akuntansi yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas keuangan daerah.

#### **f. Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.**

Menurut Gala (2013) Sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Permendagri no. 13/2006 tentang pengelolaan keuangan daerah

merupakan substansi usaha-usaha untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dan transparansi melalui pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu juga merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari paket reformasi regulasi keuangan negara khususnya mengenai penerapan di pemerintahan daerah yang mencakup tentang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Oleh karena itu, khusus mengenai akuntansi di pemerintahan daerah sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntabilitas publik.

Penelitian ini akan menguji kembali penelitian yang pernah dilakukan oleh Soleha (2014) yang menunjukkan bahwa SAKD berpengaruh dalam mewujudkan keakuntabilisan laporan keuangan pada SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh Kurnia (2013) hasil penelitiannya menunjukkan penerapan SAKD mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa penelitian terdahulu, hal ini semakin memperkuat teori yang menjelaskan bahwa SAKD dapat menunjang dan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas. Maka hipotesis yang dibentuk adalah  $H_1$ : SAKD berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **g. Hubungan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.**

Sistem pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan akuntabilitas yang baik. Oleh karena itu, UU No. 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 58, dengan sangat tepat mengamankan kepada Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan, agar mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soleha (2014) menghasilkan bahwa aktivitas pengendalian yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan memiliki tingkat hubungan yang sedang dengan memberikan pengaruh yang signifikan. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas yang baik. Pengendalian intern merupakan salah satu mekanisme paling penting dalam menghasilkan akuntabilitas dan memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengontrol operasi kegiatannya, Angraini (2016). Maka hipotesis yang dibentuk adalah  $H_2$ : Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **h. Hubungan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.**

Akuntabilitas keuangan daerah yang efektif tergantung kepada kualitas aparatur pemerintah daerah yang bersangkutan. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi yang baik, sehingga mereka memiliki profesionalitas dalam pekerjaan yang diemban. Selain pengaruh antara kualitas aparatur pemerintah dengan akuntabilitas keuangan daerah adalah bahwa semakin baik kualitas aparatur pemerintah maka semakin terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah (Kurnia, 2013). Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Prihandono (2009) menyatakan bahwa “tanpa SDM yang berkualitas, pemerintahan tidak akan berjalan sesuai keinginan dan harapan menuju sebuah target tujuan. Peran SDM mutlak sangat krusial, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan seluruh kegiatan dalam tubuh pemerintah”. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi yang baik, sehingga mereka memiliki profesionalitas dalam pekerjaan yang diemban (Kurnia, 2013). Maka hipotesisnya adalah  $H_3$ : Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **a. Jenis dan Tempat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan hubungan kausal asosiatif. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Jalan. Tasik, Talang Semut, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121.

#### **b. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel**

1. Dalam hal ini variabel independennya adalah:
  - a. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) yang diukur dengan pertanyaan tentang: (1) Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, (2) Prosedur Pencatatan Akuntansi, dan (3) Pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik.
  - b. Aktivitas Pengendalian ( $X_2$ ) yang diukur dengan pertanyaan tentang: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Resiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi dan (5) Pemantauan pengendalian
  - c. Kualitas Aparatur Pemerintah ( $X_3$ ) yang diukur dengan pertanyaan tentang: (1) Pengetahuan, (2) Keahlian dan (3) Perilaku.
2. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Keuangan Daerah ( $Y$ ) yang diukur dengan pertanyaan tentang: (1) Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang

berlaku, (2) Pertanggungjawaban kepada publik, (3) Terbuka, cepat dan tepat, (4) Penyusunan APBD dan (5) Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen.

Teknik pengukuran yang digunakan adalah *Summated Rating Method : Likert Scale* atau skala likert. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dimulai dari satu sampai lima. Untuk pernyataan positif alternatif jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 5 dan sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1.

**c. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai/karyawan bagian keuangan dan pelaporan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 37 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai di bidang keuangan dan pelaporan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan tidak mencapai 100 responden.

**d. Analisis Data**

Teknik Analisis yang digunakan adalah uji validitas, realibilitas dan uji regresi berganda. Persamaan yang dihasilkan setelah uji regresi berganda:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

Ket:

Y = Variabel terikat  $X_{1-3}$  = variabel bebas

a = konstanta  $b_{1-3}$  = koefisien regresi

e = error

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Analisis Data**

**4.1.1 Pengujian Kualitas Data**

Sebelum data diolah untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen dengan uji validitas dan reliabilitas guna melihat apakah data yang diperoleh dari responden dapat menggambarkan secara tepat. Berikut adalah hasil uji validitas dan reliabilitas:

**a. Uji Validitas**

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa nilai *corrected total corelation* untuk tiap pertanyaan pada variabel SAKD, Aktivitas Pengendalian, Kualitas Aparatur Pemerintah, dan Akuntabilitas Keuangan Daerah > r tabel 0,334. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan adalah valid. Sehingga dapat digunakan untuk mengukur variabel tersebut.

**b. Uji Reliabilitas**

Setelah dilakukan uji validitas terhadap tiap variabel, selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas. Suatu variabel dikatakan kurang baik jika memberikan nilai koefisien *Alpha Cronbach* <

0,60, sedangkan 0,7 dapat diterima dan > 0,8 adalah baik (Priyatno, 2012). Berikut hasil uji reliabilitas variabel:

**Tabel 4.1**  
**Uji Reliabilitas Variabel**

| Item                   | <i>Cronbach's Alpha</i> | N of Items | Keterangan |
|------------------------|-------------------------|------------|------------|
| SAKD                   | <b>,880</b>             | 10         | Realiabel  |
| Aktivitas Pengendalian | <b>,913</b>             | 22         | Realiabel  |
| Kualitas AP            | <b>,937</b>             | 19         | Realiabel  |
| Akuntabilitas          | <b>,781</b>             | 10         | Realiabel  |

Sumber: *Output SPSS diolah, 2017*

Berdasarkan hasil tabel 4.1, dapat dilihat hasil uji reliabilitas pada variabel SAKD menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,880, variabel aktivitas pengendalian sebesar 0,931, variabel kualitas aparatur pemerintah menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* adalah 0,937, dan variabel akuntabilitas keuangan daerah menunjukkan nilai sebesar 0,781. Sehingga instrumen kuisioner yang digunakan dapat dikatakan handal karena > 0,700.

**c. Uji Normalitas Data**

Setelah dilakukan uji validitas dan realibilitas terhadap tiap variabel, peneliti melakukan pengujian normalitas data. Berikut ditunjukkan pada tabel 4.2 mengenai uji normalitas data setiap variabel

**Tabel 4.2**  
**Uji Normalitas data**

| No | Variabel | Signifikansi Kolmogorov Smirnov Test |
|----|----------|--------------------------------------|
| 1  | X1       | 0,412                                |
| 2  | X2       | 0,699                                |
| 3  | X3       | 0,444                                |
| 4  | Y        | 0,765                                |

Sumber: *Data yang diolah, 2017*

Berdasarkan hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov Test* dalam tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa nilai per variabel dalam penelitian ini memiliki nilai > dari 0,05, yaitu untuk SAKD (X1) sebesar 0,412, Aktivitas pengendalian (X2) sebesar 0,699, Kualitas aparatur pemerintah (X3) sebesar 0,444 dan Akuntabilitas Keuangan Daerah sebesar 0,755. Hal ini berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

**4.1.2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kesahihan nilai parameter yang dihasilkan oleh model yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

**a. Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Metode uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Berikut hasil uji multikolinieritas terlihat pada tabel 4.3 :

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

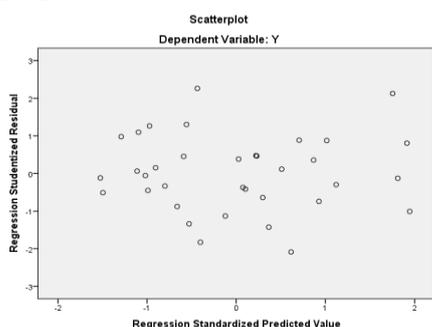
| Model               | t     | Collinearity Statistics |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
|                     |       | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)          | 1,981 |                         |       |
| 1 SAKD              | 2,106 | ,630                    | 1,588 |
| Aktiv. Pengendalian | 2,900 | ,562                    | 1,780 |
| Kualitas AP         | 3,204 | ,634                    | 1,577 |

Sumber: Output SPSS diolah, 2017

Dari tabel di atas, nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model penelitian ini.

#### b. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini melihat pola titik-titik pada *scatterplot* regresi dengan cara melihat grafik *scatterplot*. Berikut hasil uji heterokedastisitas pada gambar 4.1 :



Sumber: Output SPSS diolah, 2017

**Gambar 4.1**  
**Diagram Scatterplot Heterokesiditas**

Dapat dilihat pada gambar 4.1 bahwa diagram pencar yang ada tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heterokedastisitas atau dengan kata lain *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar), maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

#### c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Metode pengujian dengan menggunakan uji Durbin - Watson (DW test). (Priyatno, 2012). Berikut hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.4 :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

| Model | R                 | R Square | Durbin - Watson |
|-------|-------------------|----------|-----------------|
| 1     | ,778 <sup>a</sup> | ,606     | 1,629           |

Sumber: Output SPSS diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa hasil Durbin-Watson sebesar 1,629, sedangkan dari hasil tabel DW dengan signifikan 0,05 dengan jumlah data  $n = 35$  dan jumlah variabel independen  $k = 3$  menghasilkan nilai DL sebesar 1,2833 dan DU sebesar 1,6528, sesuai dengan kriteria  $DL < DW < DU$  ( $1,2833 < 1,629 < 1,6528$ ) maka dapat disimpulkan pada penelitian tidak ada kesimpulan yang pasti.

#### 4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa model telah dapat digunakan untuk pengujian hipotesis dengan analisa regresi berganda. Berikut adalah *goodness of fit* hasil uji regresi linier berganda:

##### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Ringkasan hasil pengujian koefisien determinasi adalah sebagai berikut ini :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi  $R^2$**   
**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,778 <sup>a</sup> | ,606     | ,567              | ,30455                     |

a. Predictors: (Constant), SAKD, Aktiv. Pengendalian, Kualitas AP

Sumber : Output SPSS diolah, 2017

Nilai  $R^2$  adalah sebesar 0,606. Artinya variasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 60,6%, sisanya sebesar 39,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian.

##### b. Uji F (Simultan)

Hasil dari pengujian simultan (Uji F) adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Simultan (Uji F)  
ANOVA<sup>a</sup>**

| Model        | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 4,414          | 3  | 1,471       | 15,865 | ,000 <sup>b</sup> |
| Residual     | 2,875          | 31 | ,093        |        |                   |
| Total        | 7,290          | 34 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Output SPSS diolah (2017)

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dilihat nilai F-hitung adalah sebesar 15,865 dan signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel independen SAKD (X1), Aktivitas Pengendalian (X2) dan Kualitas Aparatur Pemerintah (X3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y).

**c. Uji t (Parsial)**

Hasil uji parsial (t) dapat dilihat dalam tabel 4.7 :

**Tabel 4.7  
Hasil Signifikansi Nilai t  
Coefficients<sup>a</sup>**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|            | B                           | Std. Error |                           |        |      |
| (Constant) | 1,537                       | ,776       |                           | 1,981  | ,056 |
| 1 X1       | -,350                       | ,166       | -,299                     | -2,106 | ,043 |
| X2         | ,506                        | ,174       | ,437                      | 2,900  | ,007 |
| X3         | ,432                        | ,135       | ,454                      | 3,204  | ,003 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Daerah

Sumber: Output SPSS diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji diperoleh persamaan regresi:

$$Y = 1,537 - 0,350X1 + 0,506X2 + 0,432X3 + e$$

Selanjutnya berdasarkan hasil uji, diketahui bahwa signifikansi variabel X1 adalah sebesar  $0,043 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Variabel X2 memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$ , yang artinya variabel X2 berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Yang terakhir bahwa variabel X3 memiliki signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ , yang artinya variabel X3 berpengaruh terhadap variabel dependen Y.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah .

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan SAKD memiliki hubungan berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap akuntabilitas keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Saputra (2014) yang juga mendapatkan arah yang negatif. Namun belum sejalan dengan hasil penelitian Soleha (2014), Kurnia (2015) dan Angraini (2016). Secara teoritis hubungan SAKD terhadap akuntabilitas harusnya adalah positif. Hasil yang negatif menurut Saputra (2014) bahwa SAKD masih kurang memberi dampak terhadap akuntabilitas keuangan SKPD. Artinya bahwa terciptanya akuntabilitas keuangan di tiap-tiap SKPD tidak tergantung pada SAKD. Hal ini karena tidak semua transaksi keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem. Namun masih perlunya dilakukan analisis/identifikasi secara manual.

Dengan keadaan yang terjadi pada saat ini, penerapan SAKD cukup membantu dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah tetapi masih adanya kelemahan yang mesti harus diperbaiki, baik dari sisi sistem yang digunakan maupun pemahaman dalam penggunaan sistem yang digunakan oleh aparaturnya. Kurniawan (2013) mengatakan bahwa terdapatnya kelemahan di dalam sistem pencatatan akuntansi yang dan pelaporan keuangan daerah berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak tercatat, aset tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib. Hal ini tentu akan menyulitkan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Implikasi yang diharapkan dari SAKD terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah adanya suatu perkembangan dalam penerapan sistem yang akan digunakan serta peningkatan kualitas aparaturnya pemerintah daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan tugas dalam hal keuangan secara terkomputerisasi/manual dengan profesional, transparan, dan terbuka sehingga tetap dapat menciptakan akuntabilitas keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 4.2.2 Pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, bahwa aktivitas pengendalian memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Itu artinya apabila aktivitas pengendalian semakin meningkat maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan semakin meningkat pula. Jadi, dengan adanya pengendalian intern yang optimal dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan

secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengeluaran daerah yang dilakukan dapat berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Soleha (2014) bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Ichlas (2014) menemukan bahwa sistem pengendalian mempengaruhi keakuntabilisan keuangan daerah. Pengendalian intern merupakan salah satu mekanisme paling penting dalam menghasilkan akuntabilitas dan memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengontrol operasi kegiatan yang dilakukan (Angraini : 2016).

#### 4.2.3 Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini mendukung hasil penelitian yang pernah dilakukan Kurnia (2013) bahwa kualitas aparatur pemerintah mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah.

Akuntabilitas keuangan daerah yang efektif tergantung kepada kualitas aparatur pemerintah daerah yang bersangkutan. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi yang baik, sehingga mereka memiliki profesionalitas dalam pekerjaan yang diemban. Implikasi yang diharapkan dari kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah aparatur pemerintah daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan tugas dalam hal keuangan daerah dengan profesional, baik, transparan, dan terbuka sehingga dapat menciptakan akuntabilitas keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji maka kesimpulannya bahwa variabel SAKB berpengaruh negatif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah. Variabel Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif terhadap Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah. Dan variabel Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

## 6. REFERENSI

Angraini, Dewi Yuli. 2016. Pengaruh Penerapan Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Daerah ( Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir). *Jurnal*. Pekanbaru, Universitas Riau.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Anggaran 2014*.

2016. *Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Anggaran 2015*.

Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.

Gala, M., Noholo, S., & Husain, S. P. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis*, Vol 1 No. 1.

Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ichlas, M., Basri, H., & Arfan, M. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, Vol 3 No (4).

Kurnia, I. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, Vol 2 No (1).

Kurniawan, Ardeno. 2013. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Problematika dan Solusi*. Artikel: 9 Juli 2013. Melalui *website* <<http://inspektorat.slemankab.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-problematika-dan-solusi.slm>> (6 juni 2017).

Lukito, Peny Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN:Yogyakarta

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi : IV*. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

-----13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

Priyatno, Dwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.

Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi

Santoso, Eli Budi. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada

- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). *Tesis*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Saputra, Iskandar. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan. *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
- Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Soleha, N. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Etikonomi: Jurnal Ekonomi*, 13 (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Warisono. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.